



PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH BADAN USAHA (KPBU) SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh:

Anandyta Nur Khoirunnisa¹, Taufiq El Rahman²

INTISARI

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji penerapan asas proporsionalitas dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) SPAM Kota Bandar Lampung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung. Tujuan lain penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji apakah tujuan para pihak dalam perjanjian ini tercapai.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis normatif empiris. Penelitian normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan atas berbagai bahan hukum, baik primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder, melalui studi dokumen. Penelitian empiris dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara kepada subjek penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis data disajikan secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Perjanjian KPBU SPAM Kota Bandar Lampung belum dapat dikatakan proporsional. Hal ini dikarenakan pada tahap post kontraktual terdapat pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lainnya dan berdampak pada tujuan dibentuknya perjanjian. 2) Tujuan para pihak tidak tercapai dikarenakan terhentinya pembangunan JDU sistem gravitasi oleh Pemda Kota Bandar Lampung sehingga terjadi kegagalan target penyerapan dan pembayaran air curah yang menyebabkan hutang PDAM yang semakin bertambah setiap bulannya dan menimbulkan kerugian pada BUP.

Kata Kunci : Perjanjian KPBU, Asas Proporsionalitas, SPAM Kota Bandar Lampung

¹ Mahasiswa Strata Dua (S-2) pada program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (anandytanur@mail.ugm.ac.id).

² Dosen pada Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Implementation of The Principle of Proportionality on Public Private Partnership Bandar Lampung Bulk Water Supply Project

Anandyta Nur Khoirunnisa³ and Taufiq El Rahman⁴

ABSTRACT

This research aims to know and analyze the implementation of the principle of proportionality on Public Private Partnership Bandar Lampung Bulk Water Supply Project. Another aim is to know and analyze if the purposes of the parties are achieved.

This is descriptive research using empirical and normative juridical methode. Normative juridical research is done through the literature study of various legal materials such as primary, secondary, and tertiary legal materials. The secondary data are collected through the documents study. In order of the empirical research the author utilizes the type of primary data obtained from the interview to the subjects such as respondents and the experts based on the interview guidance. The collected data research is then analyzed qualitatively and presented in an analytical descriptive.

Based on the result of the study, it can be concluded that Public Private Partnership Bandar Lampung Bulk Water Supply Project has not implemented the principle of proportionality. Because there is a party that didn't fulfill its obligations as it should be which leads into the damage for the other party and later it impacted to the purposes that the parties want to achieve. 2) The purposes of the parties are not achieved because the piping distribution progress which is Bandar Lampung Government's obligation stopped that leads to the failure of achieving the profit target. It also impacted to the debt which keeps on increasing in each month for PJPK and the other side means the damage for BUP.

Keywords: Public Private Partnership, the principle of proportionality, Bandar Lampung Bulk Water Supply Project.

³ Mahasiswa Strata Dua (S-2) pada program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (anandytanur@mail.ugm.ac.id).

⁴ Dosen pada Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.